

PRAKTIK DINASTI POLITIK DI ARAS LOKAL PASCA REFORMASI : STUDI KASUS ABDUL GANI KASUBA DAN AHMAD HIDAYAT MUS PADA PILKADA PROVINSI MALUKU UTARA

Dafrin Muksin¹, Titin Purwaningsih², dan Achmad Nurmandi³

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

² Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

³ Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, JK School of Government UMY

E-mail: dafrin96@gmail.com

ABSTRAK.

Artikel ini berupaya untuk mengeksplorasi praktik dinasti politik yang dilakukan oleh Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (dari media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis kesamaan koding kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat legitimasi praktik dinasti politik secara modalitas dan relasinya dengan partai politik. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik Maluku Utara terjadi seiring dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Praktik dinasti politik dilakukan Abdul Gani Kasuba maupun Ahmad Hidayat Mus di legitimasi oleh modalitas yang kuat berupa modalitas ekonomi, politik, sosial, dan kultural. Praktik dinasti politik, juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci: dinasti politik; elit lokal; pasca reformasi; pemilu.

THE PRACTICE OF POLITICAL DYNASTIES AT LOCAL LEVEL AFTER REFORM: CASE STUDY OF POLITIK ABDUL GANI KASUBA AND AHMAD HIDAYAT MUS IN NORTH MALUKU PROVINCE ELECTIONS

ABSTRACT.

This article explores the practice of political dynasties conducted by Abdul Gani Kasuba and Ahmad Hidayat Mus at the election of North Maluku province, in which the pair tend practicing political dynasty. The study uses qualitative research methods with a case study approach to explain how is the legitimacy of modalities and political parties relations in the practice of political dynasties. In data collection, this research is done through a library study that concentrated on secondary data: journal, reputable online media news, and other supporting data. Furthermore, data (online media is trustworthy) to manage using Nvivo plus 12 through crosstab the analysis of queries and coding similarities. The research argued that the practice of North Maluku's political dynasties occurred along with the implementation of reforms, regional resources, and decentralization. In which the exercise of political dynasties conducted by Abdul Gani Kasuba and Ahmad Hidayat Mus was legalized by secure modalities of economic, political, social, and cultural modalities. The practice of political dynasties, also conducted through the political domination course or control over the political party in the recruitment of prospective candidates who will follow the regional head race and legislative elections at the provincial and regency/city.

Key words: politics dynasty; local elites; post reform; election.

PENDAHULUAN

Transisi demokrasi pasca Orde Baru, memberikan ruang kepada aktor nasional maupun lokal untuk terlibat dalam kontestasi pengisian jabatan melalui pemilihan umum. Transisi politik Indonesia tidak mengarah pada demokrasi liberal, melainkan demokrasi oligarki (Fukuoka,

2013:62). Kendati rezim otoriter telah berakhir, namun dunia politik masih dikendalikan oleh kaum oligark (para pemilik modal), memiliki relasi dengan kuasa lama yang begitu predators kedalam sistem yang baru pasca reformasi (Tapsell, 2018; Robison & Hadiz, 2013). Pelaksanaan demokrasi yang begitu kapitalis dan pragmatis mengakibatkan mahalnya biaya

politik, sehingga melahirkan aktor-aktor politik dalam pemilihan kepala daerah yang notabene nya memiliki keamanan dari aspek modal (uang) atau berlatar belakang sebagai pengusaha. Dengan demikian, menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yakni, kekuasaan diperoleh melalui transaksi jaringan patronasi dan konsesi politik. Serta partai politik telah dikendalikan, partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal (Herman & Uhaib, 2016: 245).

Akibatnya, desentralisasi yang diberikan sebagai efek reformasi menyisakan banyak masalah baru yang terus berlanjut. Sebut saja, misalnya, fenomena monoisme (dominasi politik keluarga) yang melahirkan kesenjangan (Firman, 2018: 115). Pengaruh kelompok elite di tingkat lokal menjadi cikal bakal lahirnya dinasti politik yang tumbuh seiring dengan proses demokratisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Di mana, terdapat kecenderungan kepala daerah melakukan praktik dinasti politik, dengan mewariskan kekuasaan kepada orang terdekat atau kerabatnya baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengusung para elite (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Klientalisme, relasi patrimonial, dan kekuatan personal selalu diandalkan sebagai legitimasi dinasti politik (Djati, 2013:228). Munculnya politik kekerabatan ditandai dengan keterlibatan sanak saudara: istri, anak, dan kerabat petahana dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Dinasti politik juga terjadi akibat adanya hasrat dari pihak petahana untuk mempertahankan kekuasaan di tingkat lokal dengan membentuk keluarga politik. Selanjutnya disebabkan karena adanya dukungan dari partai-partai besar kepada keluarga petahana sekalipun bukan dari kader partai politik (Purwaningsih, 2013:1-3). Hal itu, menjadi paradoks dalam perubahan politik lokal, yakni pengaruh partai politik dalam mempertahankan ataupun monopoli atas pencalonan kepada daerah. Elite lokal yang kaya dan berpengaruh secara politis memiliki dominasi yang kuat atas kompetisi pemilihan kepala daerah (Choi, 2019:325). Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip reformasi, sebab demokrasi *electoral* dan kebijakan desentralisasi adalah upaya untuk

mendorong partisipasi publik lebih luas dalam kontestasi politik (Hadiz, 2007:873). Di sisi yang lain modalitas: modal ekonomi, sosial, kultural dan politik sangat diperlukan kandidat (dinasti politik) untuk memperoleh kemenangan pada arena politik (Wance, 2018: 2056-260).

Desentralisasi lewat otonomi daerah justru menciptakan kesenjangan di kalangan masyarakat. Alih-alih percepatan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah justru melahirkan raja-raja baru yang mengontrol sumber daya ekonomi untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui kekuasaan yang diperoleh lewat kontestasi Pilkada. Perihal menguat nya orang lokal setelah penerapan desentralisasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung, semakin berkembang dan tersebar di berbagai daerah. Politik kekerabatan paling kuat terjadi di Provinsi Banten dan Sulawesi (Purwaningsih, 2013:3). Tidak hanya terkait dengan individu atau keluarga tertentu di daerah, fenomena ini juga terkait dengan hal lain seperti buruknya proses kaderisasi partai politik dalam perekrutan masyarakat sebagai kader yang profesional, sehingga terjadilah dinasti politik, kekuasaan atas dasar kekerabatan.

Praktik dinasti politik, sistem pemerintahan yang sentralistis, sangat akrab dengan Orde Baru yang berkuasa kurang lebih 32 tahun. Hal itu memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat, sehingga lahirnya reformasi menjadi tumpuan harapan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bernegara. Namun, dominasi elite politik yang cenderung melakukan praktik dinasti politik tidak sepenuhnya berakhir ketika runtuhnya Orde baru. Bahkan dalam banyak literatur mengisyaratkan bahwa praktik dinasti politik semakin menguat di era reformasi-pasca reformasi baik di tingkat nasional maupun lokal.

Kehadiran elite lokal untuk melakukan pengaruhnya kembali, tumbuh seiring dengan penerapan otonom daerah serta melemahnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi. Pada akhirnya, praktik pragmatisme sering dilakukan untuk mendukung kelompok elit yang melakukan pengaruhnya lewat klientalisme, kekuatan personal, dan patrimonial. Dengan begitu, menyebabkan terjadinya dinasti politik di tingkat lokal untuk melanggengkan kekuasaan demi mengontrol suara masyarakat dalam Pilkada (Effendi, 2018:112). Maraknya dinasti

politik mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Tentunya, penduduk yang dikuasai oleh dinasti politik akan lebih miskin dari penduduk yang tidak dikuasai dinasti politik. Langgengnya dinasti politik disebabkan karena: lemahnya kontrol masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kompetensi birokrasi yang rendah, dan kuatnya budaya korup dalam pemerintahan (Sujarwoto, 2015:1). Dinasti politik terjadi karena beberapa faktor: pertama, perilaku politik individu terhadap ekonomi, politik, sejarah, psikologi, sosial, dan budaya. Kedua, politik *electoral* lokal tidak membatasi keterlibatan keluarga yang memiliki dominasi secara popularitas dan karismatik (Fitri, 2019:109). Dampak negatif yang ditimbulkan dinasti politik dalam demokrasi, yaitu menghalangi publik untuk berpartisipasi baik dalam pengambilan kebijakan maupun pengisian jabatan strategis (Asako, et al., 2015:28). Di mana dalam pelaksanaan Pilkada, tidak lain adalah dinasti politik yang memiliki jejaring yang kuat selalu berkuasa. Kemudian, kekuasaan tersebut dilanjutkan oleh kalangan keluarga atau orang dekat kepala daerah. Sehingga berdampak pada tindakan korupsi yang dilakukan kepala daerah beserta kerabatnya (Susanti, 2017:111)

Praktik dinasti politik marak terjadi dan telah menyebar ke berbagai daerah. Praktik dinasti politik terjadi beriringan dengan pelaksanaan reformasi, otonomi daerah dan desentralisasi. Di mana dengan adanya sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipasi, memberikan legitimasi bagi elit lokal yang memiliki pengaruh secara ekonomi, politik, maupun sosial untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam banyak literatur telah menjelaskan bahwa keterlibatan elit politik untuk mendapatkan kekuasaan kerap kali diperoleh melalui politik uang dan *transactional*. Sehingga, politik lokal dikendalikan oleh elit politik yang memiliki modal dan strategi yang mapan. Praktik dinasti politik ditandai dengan keterlibatan sanak saudara: istri, anak, dan kerabat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif maupun pengisian jabatan Publik lainnya.

Primordial ataupun nepotisme yang merujuk pada dinasti politik merupakan salah satu varian politik familisme. Di mana, ada tiga varian familisme dalam konteks dinasti politik: pertama yaitu familisme, di mana dinasti politik terbentuk atas dasar hubungan keluarga dan

hubungan pernikahan. Kedua quasi-familisme, yaitu dinasti politik tidak hanya berada pada keluarga inti, namun sudah berjaring dengan keluarga lainnya yang memiliki kedekatan dalam sistem kekerabatan, didasarkan atas sikap afeksi dan solidaritas anggota keluarga dalam kekuasaan. Ketiga yakni egoisme-familisme, dinasti politik pada aspek jabatan fungsionalisme yaitu mengutamakan keterlibatan keluarga di atas segalanya dari keterlibatan publik untuk mengisi jabatan strategis dan suksesi pemerintahan (Djati, 2013; Garzon, 2002; Park, 2009). Praktik dinasti politik melahirkan konflik kepentingan dan menutup ruang partisipasi publik dalam kontestasi Pilkada. Dan hal itu mejadi ancaman bagi masa depan demokrasi.

Provinsi Maluku Utara sejak disahkan sebagai provinsi baru pada 1999, menyisakan banyak persoalan baru akibat dari ketidak stabil pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara memiliki suhu politik yang tinggi. Misalnya, pada tahun 2002 Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah, melawan Abdul Gaffur dan Yamin Tawari berujung pemungutan suara ulang yang dilakukan sebanyak tiga kali dan dimenangkan oleh Abdul Gaffur dan Yamin Tawari. Tetapi, pertarungan itu berlanjut ke meja Mahkamah Agung karena adanya indikasi kecurangan. Hal itu terbukti, sehingga Thaib Armaiyn dan Majid Abdulah ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Gubernur. Pada Pilkada 2008 pertarungan sengit itu terulang kembali pasangan calon Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan rival Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo yang menghasilkan sengketa Pilkada yang berlangsung selama satu tahun. Walaupun ada gugatan dari pihak Gafur-Rahim karena merasa ada kecurangan, namun Thaib-Gani tetap ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Pertarungan sengit itu, seakan berulang kembali pada Pilkada 2013 Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa melawan Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib dan Tahun 2018 Abdul Gani Kasuba berpasangan dengan Al Yasin Ali melawan Ahmad Hidayat Mus merupakan rivalnya pada Pilkada sebelumnya berpasangan dengan Rivai Umar dengan suhu dan suasana yang sama, yakni pemungutan suara ulang, serta berakhir di meja Mahkamah Agung dengan menetapkan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur Maluku Utara (Burhan Bungin, et al., 2019: 1-2). Terlepas

dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara adalah hadirnya praktik dinasti politik. Sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam banyak literature, bahwa kemunculan keluarga politik dalam politik lokal bermula dari reformasi, desentralisasi, dan otonomi daerah.

Dalam studi terdahulu tentang praktik dinasti politik dalam pilkada dilakukan melalui pendekatan modalitas dan kekuatan partai politik. Dalam hal ini, Marno Wance, (2018) melakukan pengkajian pada modalitas yang di miliki Ahmad Hidayat Mus pada Pilkada Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Selanjutnya penelitian dilakukan Baharuddin & Purwaningsih, (2015) tentang modalitas calon bupati dalam pemilihan umum Kepala Daerah tahun 2015, pada Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Zaldy Rusnaedy & Titin Purwaningsih, (2015) melakukan penelitian terhadap keluarga politik Yasin Limpo pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut berkesimpulan bahwa modalitas memiliki peranan yang sangat penting untuk memperoleh kemenangan dalam kontestasi Pilkada.

Dari aspek partai politik dilakukan oleh Purwaningsih, (2013) dengan tema politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan pada era reformasi: studi tentang recruitment politik pada partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009. Penelitian ini berargumen bahwa partai politik merupakan pintu masuk dinasti politik untuk memperoleh jabatan politik. Hal itu terjadi karena belum adanya batasan keterlibatan politik kekerabatan dalam recruitment kandidat politik, menyebabkan terjadinya politik dominasi (keluarga politik) pada pengisian jabatan politik melalui kontestasi Pilkada.

Dengan demikian, pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana menguatnya praktik dinasti politik di Maluku Utara, melalui legitimasi modalitas dan relasi dengan partai politik dalam Pilkada. Praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik, yakni, terlibatnya

keluarga dan sanak saudara dalam pengisian jabatan strategis di Maluku Utara. Dan praktik dinasti politik sangat ditentukan oleh Modalitas dan relasi dengan partai politik. Hal itu sebagaimana dalam kajian Purwaningsih, (2013) bahwa partai politik merupakan pintu masuk terjadinya politik kekerabatan. Melanjutkan narasi tersebut, Marno Wance, (2018) bahwa modalitas: modal ekonomi, sosial, kultural dan politik sangat diperlukan dinasti politik untuk memperoleh kemenangan pada arena politik. Dengan demikian, untuk melihat praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus, maka penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana modalitas dan hubungan dengan partai politik dalam Pilkada Provinsi Maluku Utara.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam mengenai praktik dinasti politik di aras lokal pasca reformasi: Studi kasus dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara. Yakni, bagaimana legitimasi secara modalitas dan relasi dengan partai politik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Lebih lanjut, dalam penjelasan John W. Creswell, (2013:20) bahwa ada beberapa strategi pendekatan yang dapat digunakan untuk memudahkan penelitian kualitatif salah satu diantaranya adalah pendekatan studi kasus, di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Menurut Creswell (2013:267-270) dalam penelitian kualitatif ada empat jenis strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi audio dan visual. Untuk itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka ataupun lebih dikonsentrasikan pada data sekunder: berupa jurnal, berita media online bereputasi, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya data (Media online bereputasi) di kelola menggunakan Nvivo plus 12, melalui analisis Coding Similarity kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Nvivo digunakan untuk menganalisis data kualitatif

demi menghasilkan hasil yang lebih profesional (Hilal & Alabri, 2013:185).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Dinasti Politik

Maluku Utara, semenjak disahkan sebagai Provinsi pada 1999 menyisakan banyak persoalan baru akibat ketidak stabil pemerintahannya. Dalam kontestasi Pilkada Maluku Utara memiliki suhu politik yang tinggi. Terlepas dari persoalan konflik Pilkada, fenomena yang terjadi pasca pemekaran Maluku Utara sebagai dampak reformasi adalah menguatnya praktik dinasti politik merujuk pada aktor yang telah berkompetisi pada Pilkada 2013 dan 2018, yakni Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Di mana keduanya memiliki kecenderungan yang sama dalam praktik dinasti politik.

Yakni, dengan terlibatnya keluarga dan senak saudara dalam pengisian jabatan strategis sebagai Anggota DPRD, Bupati/Walikota, dan Gubernur. Sehingga, politik Maluku Utara terkesan di kendalikan oleh sekelompok orang, sehingga menutup ruang publik untuk berpartisipasi dalam kontestasi pesta demokrasi di aras lokal. Hal itu sebagaimana dalam persentase hasil analisis hubungan keluarga dan jabatan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus dan Abdul Gani Kasuba di Provinsi Maluku Utara berikut ini:

Dengan begitu, praktik dinasti politik baik dari pihak Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus menunjukkan betapa sangat sistematis dan terkonsolidasi dengan baik, sehingga perjalanan karier-pengisian jabatan strategis terkesan berjalan tanpa hambatan. Dengan demikian, menunjukkan sebuah fakta bahwa praktik dinasti politik telah menguat bahkan tumbuh subur semenjak reformasi dan rentan terjadi di wilayah daerah otonomi baru, sebagaimana yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara.

Praktik dinasti politik mengarah pada pemberian hak istimewa kepada keluarga dalam urusan pelayanan, kebijakan, dan pengisian jabatan publik (baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif). Dinasti politik dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, tidak hanya soal kedekatan keluarga melainkan juga faktor kedekatan pribadi, politik, dan hubungan sosial lainnya yang mendukung terjadinya relasi familisme. Patron menjadi legitimasi yang kuat atas relasi familisme karena klien selalu berdampingan patron. Dengan demikian relasi dinasti politik bisa terjadi di mana pun dan dengan siapa pun (Azahra, 2019:115-116). Kepercayaan dan solidaritas merupakan hal yang diprioritaskan untuk pembentukan keluarga politik, sebab hal itu sangat menentukan eksistensinya dalam lingkaran kekuasaan. Pada prinsipnya dinasti politik dalam praktik demokrasi lokal di dasarkan

Tabel 1. Jabatan Dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Politik
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-2024
	Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010
	Bahrain Kasuba/keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPRD periode 2009-20014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD periode 2004-205 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015
	Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Bupati DOB Kepulauan Taliabu sejak 2016-2021
	Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Keplauan Periode 2017-2022),
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPDRI 2019-2024

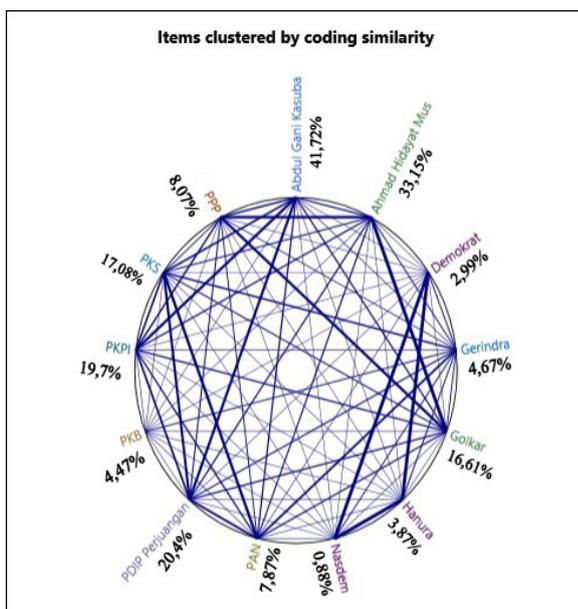
Sumber: Diolah dari berbagai berita media online bereputasi.

pada pesonalisme, klientalisme dan tribalisme (Fahrurrozi, 2017). Praktik familisme melalui dinasti politik telah tumbuh–menguat di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu terjadi bukan hanya persoalan adanya orang kuat yang berkuasa di daerah, namun juga karena minimnya kontrol atas kekuasaan dan rendahnya kesadaran atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang dunia politik (Fikri & Adytyas, 2018: 173).

Relasi Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Dengan Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah sistem demokrasi, partai politik menjadi jembatan untuk menegosiasikan kepentingan publik, menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara. Partai politik memiliki peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Thomas Meyer, 2012:7). Partai politik juga menjadi jembatan bagi calon kepala daerah untuk memenangkan kontestasi Pilkada. Untuk itu, relasi calon kepala daerah dengan partai politik menentukan dukungan, basis masa partai, dalam Pilkada. Di mana relasi tersebut menjadi sebuah relasi untuk kepentingan jangka panjang pada momentum pesta demokrasi. Hal itu sebagaimana relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Relasi Dinasti Politik Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus dengan Partai Politik dengan Partai Politik



Sumber: Diolah menggunakan Nvivo plus 12 dari berbagai media online bereputasi

Berdasarkan analisis similarity Nvivo di atas terlihat bahwa relasi dinasti politik Abdul Gani Kasuba, memiliki relasi dengan partai PKS yang lebih dominan dengan presentasi 17,08%, disusul dengan beberapa partai PKB , PAN, Gerindra, Demokrat, Hanura, PPP, dan sebagian kecil partai Golkar. Juga memiliki relasi dengan PDI-Perjuangan, PKPI yang begitu erat. Sedangkan dinasti politik Ahmad Hidayat Mus, memiliki relasi yang sangat erat dengan Partai Golkar mencapai 16,61%, kemudian dengan partai PPP, Demokrat, Gerindra, PAN, sebagian kecil PDI-Perjuangan, dan PKS.

Jabatan Dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus Dalam Partai Politik

Dominasi elite, dengan mengontrol partai politik, menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif baik dalam pengisian jabatan maupun dalam pembuatan kebijakan. Jika partai politik dikendalikan oleh kelompok pemodal yang sangat sarat dengan praktik oligarki, maka akan berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Di banyak kasus, menunjukkan bahwa kemacetan demokrasi disebabkan karena tidak stabilnya partai politik. Dengan adanya kontrol atas partai politik inilah merupakan pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik. Hal itu juga sangat dipengaruhi oleh pragmatisme Partai Politik. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana praktik dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus. Yaitu, melakukan kontrol atas partai politik dengan mengisi jabatan-jabatan strategis, baik di daerah maupun sampai di tingkat nasional diantaranya di jelaskan pada tabel 2.

Berdasarkan hasil presentasi tabel 2 di atas, terlihat bahwa partai politik adalah pintu masuk terjadinya praktik dinasti politik di Maluku Utara. Abdul Gani Kasuba melakukan praktik dinasti politik dengan mengendalikan Partai PKS, menjabat sebagai Ketua Partai sekaligus sebagai Ketua Badan Pembina Umat Provinsi Maluku Utara. Muhammad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba merupakan Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS. Dan Bahrain Kasuba selaku keponakan Abdul Gani Kasuba pernah menjabat sebagai Ketua DPD PKS, dan sebagai Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan. Selanjutnya, praktik

dinasti politik yang dilakukan Ahmad Hidayat Mus dengan melakukan kontrol kekuasaan melalui partai Golkar di mana Hidayat Mus sebagai Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, dan Papua di masa kepengurusan Setya Novanto. Keterlibatan keluarga Ahmad Hidayat dalam partai Golkar diantaranya: Aliong Mus adik dari Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPD Kab. Pulau Taliabu, Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus sebagai kader partai, dan Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara.

Dengan demikian, adanya kontrol atas partai politik menyebabkan terhimpitnya ruang demokrasi. Hal itu tentu sangat mempengaruhi partisipasi publik dalam kontestasi Pilkada. Sehingga kontestasi Pilkada Provinsi Maluku Utara terkesan dikendalikan oleh dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

Dukungan Partai Politik Kepada Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa relasi dinasti politik dengan partai politik sangat mempengaruhi kedudukan dari dinasti politik dalam suksesi Pilkada, sebab relasi tersebut menjadi legitimasi ataupun penentu dukungan Partai Politik terhadap praktik dinasti politik.

Dukungan Partai Politik kepada dinasti politik pada Pilgub Tahun 2013, Abdul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Taib, Partai PKS menjadi pendukung utama dan juga mendapatkan dukungan partai Republikan, Partai Demokrasi Kebangsaan, PKB, PKPI, dan Partai Peduli Rakyat Nasional. Pada periode kedua, Pilgub 2018, Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali diusung oleh PDI-P dan PKPI. Dengan demikian, PKPI menjadi partai yang konsisten memberikan dukungan kepada Abdul Gani Kasuba. Sedangkan PDIP hanya memberikan dukungan pada periode kedua menggantikan dukungan partai PKS karena telah memberikan rekomendasi kepada Muhammad Kasuba selaku adik dari Abdul Gani Kasuba berpasangan Majid Husen dalam Pilgub tersebut yang diusung oleh PKS, Partai Gerindra, dan PAN. Selanjutnya pada Keluarga Politik Ahmad Hidayat Mus: Partai Golkar dan PPP menjadi partai yang setia memberikan dukungan. Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa Pada Pilgub 2013 diusung Partai Golkar, Hanura, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa. Periode kedua pada Pilgub 2018, Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar diusung oleh Partai Golkar dan PPP (www.kompas.com, 2018)

Tabel 2. Jabatan Dinasti politik Dalam Partai Politik Maluku Utara

Keluarga	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan Dalam Partai
Kasuba	Abdul Gani Kasuba	Ketua PKS, Ketua Badan Pembina Umat PKS Provinsi Maluku Utara
Muhammad Kasuba/adik Abdul Gani Kasuba	Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur DPP PKS	
Bahrain Kasuba/ keponakan Abdul Gani Kasuba	Ketua DPD PKS, Ketua DPK PKPI Halmahera Selatan	
Mus	Ahmad Hidayat Mus	Korbid Pemenang Pemilu Indonesia II Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan-Sulawesi, dan Papua Partai Golkar
Aliong Mus/adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPD Golkar Kab. Pulau Taliabu	
Zainal Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Kader Partai Golkar	
	Alien Mus/ adik Ahmad Hidayat Mus	Ketua DPD I Partai Golkar Maluku Utara

Sumber: Dikelola dari berbagai berita media online.

Modalitas Dinasti Politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus

Dalam kontestasi Pilkada, modalitas berupa modal ekonomi, politik sosial dan modal kultural merupakan modal utama yang mestinya dimiliki para kandidat. Semakin besar modalitas yang dimiliki oleh pasangan calon, memiliki lebih dari satu modal, sangat menentukan peluang untuk terpilih sebagai kepala daerah (Baharuddin & Purwaningsih, 2015:211-212). Terlepas dari modalitas yang ada, modal sosial berupa kepercayaan terhadap pasangan calon juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pemilihan kepala daerah, sebab modal sosial menjadi tolak ukur kelayakan pasangan calon untuk dipilih oleh masyarakat. Jika, pasangan calon memiliki legitimasi modal sosial yang kuat tentu tidak hanya dekat dengan masyarakat, namun juga akan diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin (Ratnia Solihah, 2019:30-31). Kemampuan mengelola modal politik untuk membangun kekuatan personal dengan menghubungkan dengan modal sosial, yakni memanfaatkan jaringan sosial, atas ikatan etnis dan identitas agama adalah prasyarat utama untuk mendapatkan dukungan dari partai politik serta dukungan dari para pemilih demi memperoleh kemenangan Pilkada (Ika Kartika, et al., 2018:148). Dengan begitu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa modalitas memiliki peran yang sangat penting untuk memenangkan kontestasi pilkada. Modalitas dalam pembahasan ini merujuk pada dinasti politik Abdul Gani Kasuba dan Ahmad Hidayat Mus.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi dibutuhkan untuk kelancaran kerja-kerja dalam memenangkan kompetisi Pilkada. Modal ekonomi dalam Pilkada berkaitan dengan kekayaan calon kepala daerah berupa kekayaan pribadi dan sumbangan kampanye. Sebagaimana terlihat dalam kontestasi Pilkada 20018, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 8 Januari 2018, Abdul Gani Kasuba menduduki posisi keempat dari pasangan calon lainnya dengan kekayaan sebanyak Rp 6.545.876.657, diantaranya harta tanah dan bangunan Rp 5.380.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 100.000.000, harta bergerak lainnya Rp.360.000.000, serta kas Rp. 1.035.876.657,

dan hutang senilai Rp 330.00.00. Ali Yasin sebagai wakil Abdul Gani Kasuba dengan jumlah kekayaan 22.233.400.1 terbanyak kedua setelah Ahmad Hidayat Mus (www.kieraha.com, 2018).

Sebagai aktor yang memiliki latar belakang pengusaha, menyebabkan Ahmad Hidayat Mus secara modal ekonomi, memiliki legitimasi yang kuat dalam Pilkada. Pada periode 2013-2018 kekayaan Ahmad Hidayat Mus mencapai Rp 35.212.963.348 dan Rp 110.000 dollar AS. Pada periode 2018 Hidayat Mus memiliki kekayaan yang berada dalam kategori urutan pertama dengan kekayaan sebesar 52.241.112.1, lebih besar dari kandidat yang lain. Terdiri dari harta tanah dan bangunan Rp 33.855.304.500, harta alat transportasi dan mesin Rp 7.950.000.000, harta bergerak lainnya Rp 1.570.000.000, dan kas setara kas besar dengan besaran Rp 8.865.907.694 (www.tempco.co, 2018)

Dengan demikian, Secara modal ekonomi Abdul Gani Kasuba tergolong tidak terlalu mapan ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk mengimbangi dan memenangkan kontestasi Pilkada Abdul Gani kerap memilih aktor yang memiliki modal ekonomi yang mapan sebagai wakilnya.

Modal Politik

Abdul Gani Kasuba memiliki legitimasi yang sangat kuat semenjak menjadi wakil gubernur dan melanjutkan sebagai gubernur 2 periode. Disisi yang lain Abdul Gani Kasuba Juga memiliki komunikasi politik dan strategi politik yang baik. Hal itu dibuktikan ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, bukan kader partai, mendapatkan rekomendasi PDI-P dalam pencalonan Pilgub 2018. Modal politik dinasti politik Abdul Gani Kasuba berawal ketika Muhammad Kasuba yang merupakan adik kandung Abdul Gani Kasuba memangku jabatan Anggota DPRD Maluku periode 1999-2001, setelah Maluku Utara disahkan sebagai Provinsi pada tahun 1999 Muhammad Kasuba terpilih sebagai Anggota DPRD Maluku Utara dua periode 2001-2005, dan menjadi Bupati Halmahera Selatan dua periode 2005-2010.

Pada Tahun 2004 Abdul Gani Kasuba memulai karier sebagai Anggota DPDRI periode 2004-2007, Wakil Gubernur tahun 2009-2014 dan Gubernur dua periode 2014-2024, dengan

jenjang karier yang begitu cepat, menjadikan Abdul Gani Kasuba sebagai simbol dari keluarga Kasuba. Dan Bahrain Kasuba keponakan dari Abdul Gani Kasuba pun mengawali karier sebagai Ketua DPRD periode 2009-2014, Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2015 dan Bupati Halmahera Selatan periode 2016-2021. Berakhirnya jabatan Muhammad Kasuba, digantikan Bahrain Kasuba sebagai Bupati di Halmahera Selatan menunjukkan pengaruh keluarga Kasuba sangat kuat berada di wilayah tersebut. Selanjutnya, modal politik dinasti Mus diawali dengan terpilihnya Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai Ketua DPRD periode 2004-2015 dan Bupati Kepulauan Sula dua periode 2005-2015.

Pada tahun 2016 AHM menjadi tokoh pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Hasil pemekaran Pulau Taliabu itu, mejadi awal karier Aliong Mus, merupakan adik kandung Ahmad Hidayat Mus, meraih kemenangan sebagai Bupati atas Zainal Mus yang juga saudaranya sendiri. Zainal Mus mejabat sebagai Ketua DPRD Sula periode 2009-2014 dan Bupati Banggai Kepulauan Periode 2017-2022. Dan Alien Mus adik kandung Ahmad Hidayat Mus menjabat sebagai Ketua DPRD Malut periode 2014-2019 dan Anggota DPD-RI 2019-2024. Dinasti politik Mus sangat kuat terjadi di Wilayah Kepulauan Sula dan sekitarnya.

Modal Sosial

Modal sosial menjadi syarat kelayakan untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam kontestasi Pilkada. Jika kandidat kepala daerah memiliki modal sosial yang mapan akan memperoleh kemenangan, sebab tidak hanya dikenal oleh masyarakat melainkan juga dianggap layak untuk menjadi pemimpin kepala daerah. Secara modal sosial, Abdul Gani Kasuba merupakan salah satu tokoh yang paling dikenal. Dimulai ketika ia terlibat aktif, berkunjung di pengungsian untuk memberikan ceramah ataupun bantuan, ketika konflik sara berkecamuk di wilayah Maluku Utara. Sebagai alumnus Universitas Madinah, Abdul Gani Kasuba dikenal sebagai seorang Dai, bahkan kerap dijuluki sebagai “Dai seribu pulau” hal itulah yang membuat dirinya begitu akrab dan dikenal luas masyarakat Maluku Utara yang

penduduknya adalah mayoritas Islam. Ahmad Hidayat Mus memiliki legitimasi basis massa Kesultanan Ternate karena pernah dinobatkan sebagai bagian dari pihak kerajaan. Namun, dengan keberagaman budaya masyarakat Maluku Utara membikin Ahmad Hidayat Mus tidak begitu dikenal, sehingga dukungan pemilih pun lebih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba. Sebagaimana dalam presentasi perolehan suara dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 dan Tahun 2018 berikut ini:

Tabel 3. Perolehan Suara Dalam Pilkada Maluku Utara Tahun 2013 Dan Tahun 2018

Pemilihan Gubernur Tahun 2013	Suara	%	Suara Putan Kedua
Adul Gani Kasuba-Muhammad Natsir Thaib	123.689	21,54%	262.983
Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa	163.684	28,50%	258.747
Pemilihan Gubernur Tahun 2018			
Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali	176.669	31,79%	
Ahmad Hidayat Mus- Rivai Umar	175.749	31,62%	

Sumber: Diolah oleh penulis dari Wikipedia

Dari tabel 3. di atas, menunjukkan bahwa dukungan pemilih cenderung diberikan kepada Abdul Gani Kasuba, sehingga mengantarkannya untuk menduduki kursi kekuasaan Gubernur dua periode dan Ahmad Hidayat Mus harus menerima kekalahan untuk kedua kalinya pada Pilkada Provinsi Maluku Utara.

Modal Kultural

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku Utara sangat beragam, memiliki sekitar 28 suku dan bahasa tersebar di 10 Kabupaten/ Kota diantaranya: Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Eropa.

Meskipun demikian, dalam kontestasi pilkada Suku Togale (Tobelo-Galela) dan Makayoa (Makian-Kayoa) adalah suku mayoritas yang memiliki peran yang sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi pilkada Maluku Utara.

Untuk itu, Secara modal kultural Abdul Gani Kasuba, lelaki kelahiran Tobelo, memiliki identitas kebudayaan sebagai masyarakat suku Togale (Tobelo-Galela) yang juga merupakan salah satu suku mayoritas di Maluku Utara. Hal itulah yang menjadi legitimasi yang kuat kemenangannya sebagai Gubernur. Sedangkan Ahmad Hidayat Mus tidak begitu berpengaruh karena tidak dilahirkan dari suku mayoritas yakni berasal dari Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk mengimbangi Abdul Gani Kasuba, Ahmad Hidayat Mus memilih Rivai Umar, merupakan tokoh dalam kalangan masyarakat Makayoa, sebagai wakil dalam kontestasi Pilkada.

SIMPULAN

Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengusung para elit (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Hal itu mendorong terjadinya praktik dinasti politik dan berdampak pada partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perayaan pesta demokrasi baik dalam Pilkada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pemilihan legislatif.

Praktik dinasti politik dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus maupun Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, di legitimasi oleh modalitas yang kuat baik modalitas ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Semakin banyak modalitas yang dimiliki, maka semakin menentukan kemenangan pada kontestasi Pilkada. Abdul Gani Kasuba memiliki kelemahan pada aspek modal ekonomi, ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk itu, Abdul Gani Kasuba memilih wakilnya yang memiliki ekonomi yang dapat mengimbangi modal ekonomi Ahmad Hidayat Mus. Pada modal politik keduanya memiliki legitimasi yang sepadan. Dari Aspek modal kultur dan sosial Abdul Gani Kasuba lebih kuat daripada Ahmad Hidayat Mus. Karenanya, modalitas yang dimiliki oleh Abdul Gani Kasuba lebih besar dari Ahmad Hidayat Mus, sehingga

mengantarkan Abdul Gani Kasuba menduduki kekuasaan sebagai Gubernur dua periode pada Pilkada 2013 dan 2018.

Praktik dinasti politik juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Abdul Gani Kasuba Melakukan kontrol terhadap partai PKS dan Ahmad Hidayat Mus Melakukan kontrol atas Partai Golkar.

Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam kontestasi Pilkada Partai PKS cenderung memberikan dukungan kepada keluarga Kasuba, sedangkan Partai Golkar cenderung mendukung keluarga Mus. Dukungan partai politik diberikan berupa dukungan secara kelembagaan partai serta secara basis massa untuk memilih kandidat dari keluarga politik yang telah diusung. Dan praktik dinasti politik menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pesta demokrasi lokal melalui Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asako, Y., Matsubayashi, T., & Ueda, M. (2015). *Dynastic Politicians : Theory And Evidence From Japan Science : Email Alerts : Click Here Terms Of Use : Click Here*, (March). <https://doi.org/10.1017/S146810991400036x>
- Azahra, J. M. (2019). Politik Familisme Di Tubuh Partai Islam Lokal : Studi Kasus Partai Persatuan Pembangunan (Ppp) Kabupaten, 1–18.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2015). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
- Bungin, B., Syarif, N., & Teguh, M. (2019). Citra Aktor Politik Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, 3(1), 1–13.
- Choi, N. (2019). Elections , Parties And Elites In Indonesia Local Politics, 15(3), 325–354.

- Djati, W. R. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi : Dinasti Politik Di Aras Lokal, 205–230.
- Fahrurrozi, (2017). Diaspora Politik Keluarga Organisasi, *13*(1), 83. <https://doi.org/10.18196/Aiijis.2017.0068.82-109>
- Fikri, M. S., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas Dan Penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong Kito Dalam Demokrasi Lokal), *Xviii*(2), 173.
- Firman, (2018). Desentralisasi Dan Monoisme Masyarakat (Praktek Elit Lokal Melanggengkan Dominasi), *3*, 115–127.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik Pada Pemerintahan Di Tingkat Lokal, *4*, 91–111.
- Fukuoka, Y. (2013). *Oligarchy And Democracy In Post-Suharto*, *11*, 52–64. <https://doi.org/10.1111/J.1478-9302.2012.00286.X>
- Garzon, A. (2002). *Familism.*” Hal. 1-4, Dalam *International Encyclopedia Of Marriage And Family*, Diedit Oleh En J. Ponzetti. New York: Macmillan.
- Hadiz, V. R. (2007). *The Localization Of Power In Southeast Asia*, *14*(5), 873–892.
- Herman, M., & Uhaib, M. (2016). *Local Elections, Local Actors And Political Patronage Networks (Understanding Involvement Of Coal Mining Bosses In The Local Elections In South Kalimantan Province)*, 228–247.
- Hilal, A. H., & Alabri, S. S. (2013). *Using Nvivo For Data Analysis In Qualitative*, *2*(2).
- Ika Kartika, M. R., Dan N. Y. Y. (2018). *Political Capital Of Tjhai Chui Mie In 2017 Singkawang Mayoral Election*, *3*(2), 139–149.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Desain: Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, Dan Mixed (Edisi Ketu)*. Yogyakarta.
- Wance, M. W. (2018). *Modalitas Dinasti Ahmad Hidayat Mus Pada Pemilihan*, 2018.
- Park, T.-H. (2009). *The Influence Of Familism And Interpersonal Trusts Of Korean Public Officials*”. *International Review Of Public Administration*, *9*(1): 121-136.
- Purwaningsih, T. (2013). *Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*, 1–90.
- Solihah, R. (2019). *Modal Sosial Jeje-Adang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015*, *4*(1), 30–43.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2013). “*The Political Economy Of Oligarchyand The Reorganization Of Power In Indonesia*,” 35.
- Tapsell, R. (2018). *Kuasa Media Di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, Dan Revolusi Digital*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Sujarwoto. (2015). *Desentralisasi, Dinasti Politik Dan Kemiskinan Di Indonesia*, *1*(2), 1–6.
- Susanti, M. H. (2017). *Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia*, *1*(2), 111–119.
- Meyer, T. (2012). *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa (Cetakan Ke)*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (Fes).
- Effendi, W. R. (2018). *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten*, *2*(2), 98–113.
- Rusnaedy, Z., & Purwaningsih, T. (2015). *Keluarga Politik Yasin Limpo Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gowa Tahun 2015*.
- Kieraha. (2018, Juni 26). *AHM Cagub Paling Kaya di Maluku Utara*. Diakses 20 Desember 2019, dari kieraha.com: <https://kieraha.com/ahm-cagub-paling-kaya-di-maluku-utara/>
- Tempo. (2020, Januari 20). *Harta Cagub Maluku Utara Tersangka Korupsi Mencapai Rp 52 Miliar*. Diakses tanggal 20 Desember 2019, dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.co/read/1070638/harta-cagub-maluku-utara-tersangka-korupsi-mencapai-rp-52-miliar>.
- Kompas. (2018, Februari 12). *4 Pasangan Calon Lolos, Kakak Beradik Bertarung*

di Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/22073601/4-pasangan-calon-lolos-kakak-beradik-bertarung-di-pilkada-maluku-utara>.

Liputan 6. (2018, Februari 13). 4 Pasangan Calon Pilgub Malut Resmi nomor Urut. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3283224/4pasangan-calon-pilgub-malut-resmi-kantongi-nomor-urut>.

CNN Indonesia. (2018, September 12). Gubernur Maluku Utara Kader PKS Tegas Dukung Jokowi Ma'ruf. Diakses 20 Desember 2019, dari cnn indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018091220340732329759/gubernur-maluku-utara-kader-pks-tegas-dukung-jokowi-maruf>

Tribun news, (2018, Januari 9). Kakak Beradik dari PKS Bertarung Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/regional/2018/01/09/kakak-beradik-dari-pks-bertarung-di-pilgub-maluku-utara>.

Liputan 6. (2018, April 02). Kentalnya Nuansa Politik Dinasti Pasangan Calon Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/pilkada/>

[read/3421341/kentalnya-nuansa-politik-dinasti-pasangan-calon-pilkada-maluku-utara](https://www.liputan6.com/pilkada/read/3421341/kentalnya-nuansa-politik-dinasti-pasangan-calon-pilkada-maluku-utara).

Kompas, (2019, Desember 16). KPU Maluku Utara Tetapkan Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin sebagai Gubernur dan Waagub Terpilih. Diakses 20 Desember 2019, dari kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/12/16/20304391/kpu-maluku-utara-tetapkan-abdul-gani-kasuba-dan-al-yasin-sebagai-gubernur>.

Liputan 6, (2018, Januari 04). PDIP Jagokan Abdul Gani Kasuba-Al Yasin di Pilkada Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/3215259/pdip-jagokan-abdul-gani-kasuba-al-yasin-di-pilkada-maluku-utara>.

Liputan6,(2018,Juni30).GolkarBersyukurPasangan yang Diusung Menang Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/3574603/golkar-bersyukur-pasangan-yang-diusungnya-menang-pilgub-maluku-utara>

Tempo, (2017, Desember 16). PPP Usung Ahmad Hidayat Mus dan Rifai Umar di Pilgub Maluku Utara. Diakses 20 Desember 2019, dari tempo.co: <https://pilkada.tempo.com/read/1045356/ppp-usung-ahmad-hidayat-mus-dan-rifai-umar-di-pilgub-maluku-utara>